

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

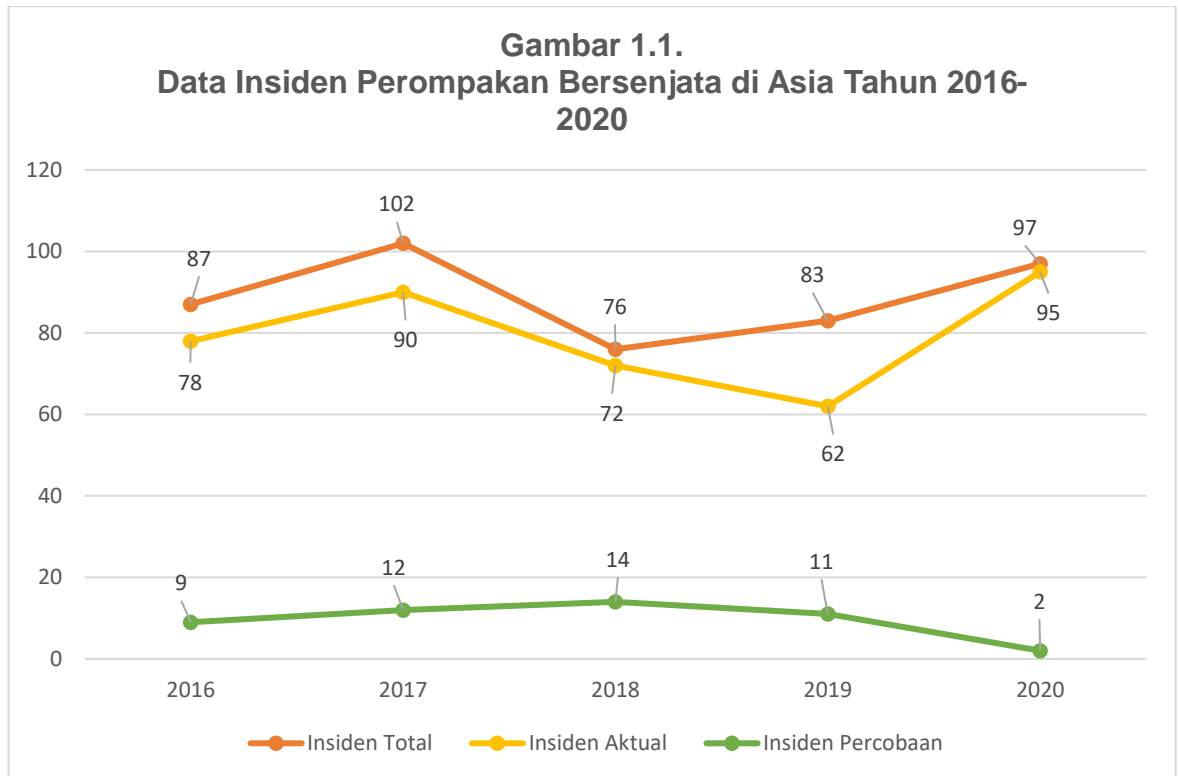
Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memandang penting untuk membangun sebuah kekuatan pertahanan. Perkembangan global menyebabkan banyak perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep keamanan selalu mengalami pergeseran. Konsep keamanan saat ini tidak hanya menyangkut konsep keamanan yang konvensional seperti kekhawatiran terhadap kekuatan militer suatu negara. Pergeseran konsep keamanan saat ini mengarah pada konsep keamanan nonmiliter yang dilakukan oleh berbagai aktor non-negara. Aktor non-negara saat ini menjalankan banyak peran-peran vital dalam keamanan. Perkembangan zaman atau globalisasi juga menyebabkan negara-negara di dunia menjadi seakan tidak memiliki batas atau *borderless* sehingga dinamika ancaman menjadi semakin berkembang. Salah satu ancaman yang mengancam keamanan baik global maupun regional yaitu kejahatan lintas batas (*transnational crime*). Kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara (Kemlu RI, 2019).

Kejahatan lintas negara saat ini dipandang sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan global. Di kawasan Asia Tenggara, kejahatan ini merupakan ancaman serius dan menjadikan kerawanan bagi stabilitas keamanan. Sesuai dengan program implementasi rencana aksi ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara (*Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat*

Transnational Crime) yang menyatakan bahwa di kawasan ini terdapat beberapa jenis kejahatan lintas negara seperti: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, perompakan laut, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, kejahatan perbankan internasional dan kejahatan siber (Kementerian Pertahanan RI, 2015, p. 13). *Sea piracy* atau perompakan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan Asia. Perompakan ini berarti sebuah tindakan illegal kekerasan atau penahanan, atau tindakan perusakan yang dilakukan untuk tujuan pribadi di laut lepas melawan kapal lain atau terhadap orang atau properti di atas kapal tersebut, dan terhadap kapal orang atau properti di tempat di luar yurisdiksi negara bagian manapun, serta tindakan partisipasi suka rela dalam pengoperasian kapal dengan pengetahuan fakta menjadikannya kapal bajak laut (ReCAAP ISC, 2019, p. 37). Kegiatan perompakan ini berkaitan dengan perampokan bersenjata di mana terdapat tindakan illegal kekerasan atau penahanan dan perusakan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dihimbau untuk bekerja sama dalam mengatasi berbagai kejahatan transnasional di kawasan. Pada tahun 2006, terbentuklah sebuah organisasi *government-to-government* yaitu *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ship in Asia* (ReCAAP). Pembentukan ReCAAP dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antar negara dalam mengatasi perompakan di kawasan Asia.

Pembajakan di laut merupakan ancaman keamanan bagi wilayah perairan manapun. Semakin hari, pembajakan di laut berkembang menjadi sebuah kejahatan dengan pola yang kompleks. Pola ini meliputi berbagai perubahan dalam modus operandi yang awalnya hanya sebuah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan alat-alat sederhana oleh kelompok orang di daerah pesisir menjadi sebuah kejahatan yang modern dan terorganisir (Anastasya & Meliala, 2017). Berdasarkan penjabaran sebelumnya, kejahatan *sea piracy* atau

perompakan merupakan sebuah kejahatan yang sering terjadi di kawasan Asia. Berikut data insiden perompakan bersenjata di kawasan Asia dari tahun 2016 hingga 2020:



Sumber: ReCAAP ISC Summary 2020.

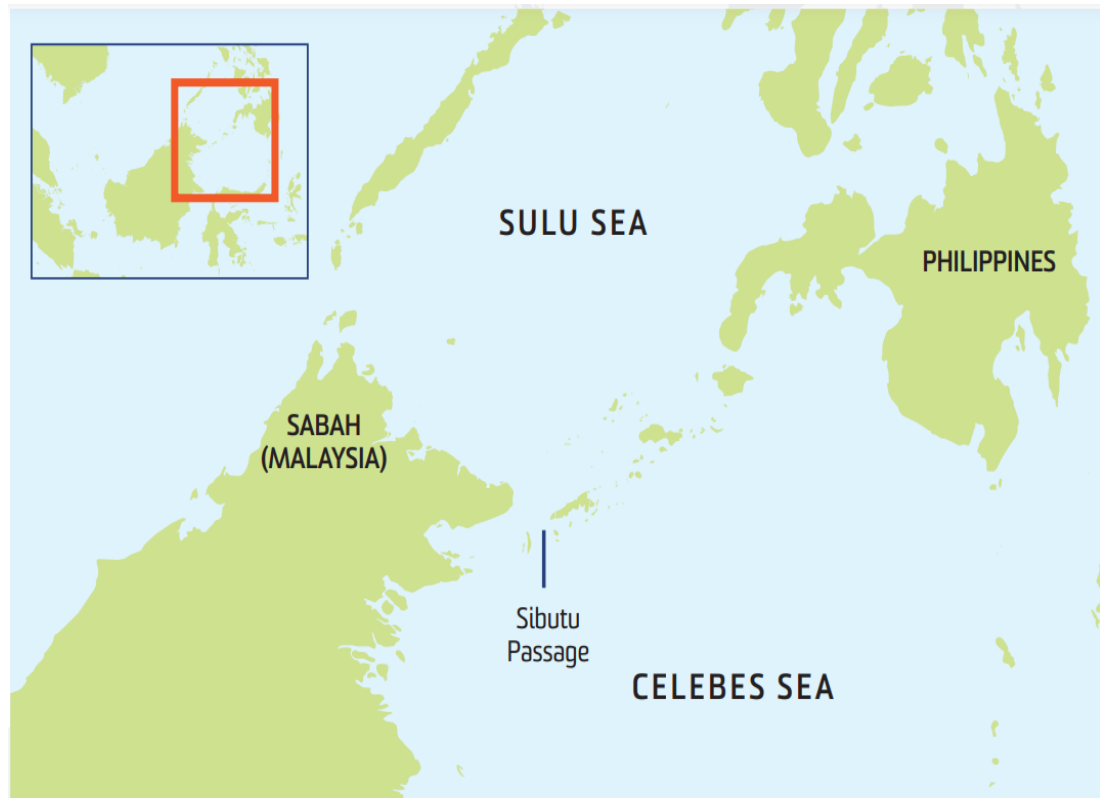
Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa insiden perompakan bersenjata di kawasan Asia mengalami fluktuasi di mana insiden perompakan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat peningkatan insiden aktual dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan perompakan bersenjata masih menjadi sebuah ancaman bagi kawasan Asia.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan empat *choke points* yang strategis bagi kepentingan global

(Kementerian Pertahanan RI, 2014, p. 20). Kawasan maritim Indonesia dipandang memiliki nilai strategis bagi kepentingan global, terutama sebagai jalur perdagangan dan transportasi. Kondisi ini menyebabkan kawasan perairan Indonesia menjadi rawan terhadap berbagai ancaman termasuk ancaman kejahatan transnasional. Ancaman kejahatan transnasional saat ini berkembang secara masif dan terorganisir. Mengingat fenomena kejahatan ini berdampak besar terhadap stabilitas keamanan dan berpotensi mengganggu serta mengancam pembangunan nasional, maka Indonesia senantiasa konsisten dalam upaya penegakan hukum dan melindungi warga negara dari mata rantai kejahatan lintas negara (Kementerian Pertahanan RI, 2015, p. 14)

Salah satu perairan yang sering menjadi lokasi perompakan bersenjata yaitu kawasan perairan Laut Sulu-Sulawesi. Laut Sulu-Sulawesi terletak di bagian timur Asia Tenggara yang terdiri dari Laut Sulu dan Sulawesi. Laut Sulawesi secara langsung bersambungan dengan Laut Sulu, hanya terpisah oleh pulau-pulau kecil yang diantaranya terdapat celah-celah perairan. Kedua laut ini terletak di puncak Segitiga Terumbu Karang Dunia yang mengiris tiga negara yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia (Rustam, 2017, p. 6). Laut Sulu-Sulawesi ini melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia II atau ALKI II. Peta lokasi Laut Sulu-Sulawesi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2.
Peta Lokasi Laut Sulu-Sulawesi



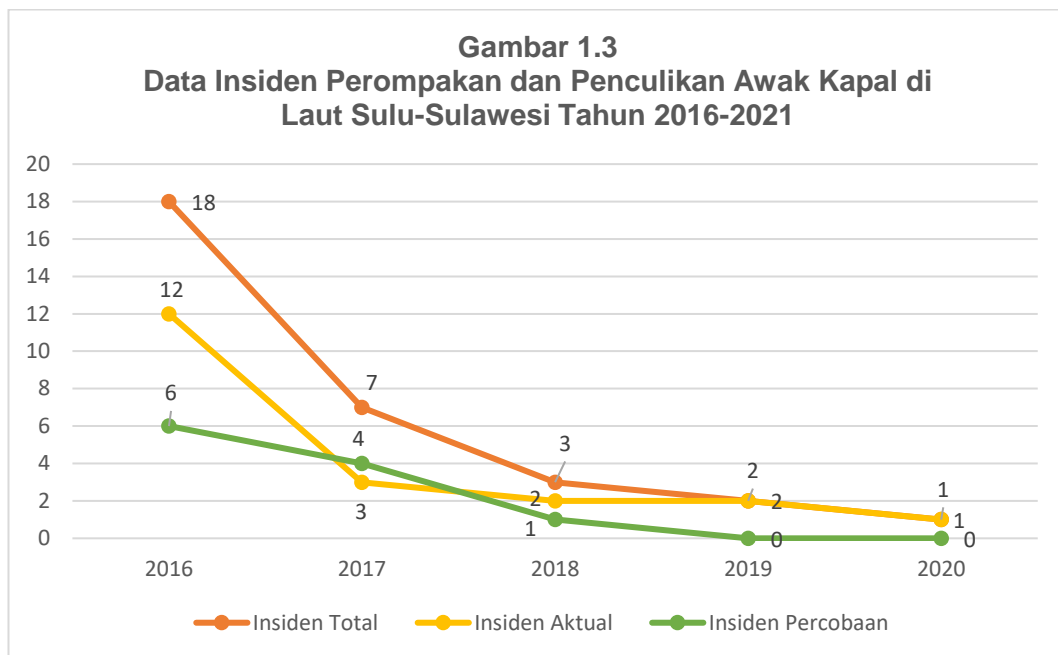
Sumber: Guidance on Abduction of Crew in the Sulu-Celebes Seas and Waters off Eastern Sabah ReCAAP ISC 2019

Pada gambar 1.2. dapat dilihat bahwa posisi Laut Sulu-Sulawesi ini mengiris dan berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Laut Sulu terletak di barat daya Filipina yang dipisahkan dari Laut Cina Selatan di barat laut oleh Palawan dan dari Laut Sulawesi di Tenggara oleh Kepulauan Sulu sementara Laut Sulawesi di barat Samudera Pasifik dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindano, Filipina di utara, di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Sulawesi, dan di barat oleh Kalimantan (P2K ITBU, 2021). Laut Sulu-Sulawesi tidak hanya memiliki arti penting bagi ketiga negara yang beririsan langsung namun juga memiliki arti penting dalam pelayaran perdagangan global. Kapal-kapal niaga internasional yang menggunakan jalur ini biasanya membawa

batu bara dan komoditas lainnya ke China, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Setiap tahunnya lebih dari 100,000 kapal melewati Laut Sulu-Sulawesi membawa 55 juta metrik ton kargo dan 18 juta penumpang. Setiap tahunnya kargo yang lewat bernilai sekitar 40 miliar dollar, di antaranya 700-800 juta dollar berupa ekspor batu bara Indonesia ke Filipina (Roza, 2018, p. 3). Selain itu, bentang Laut Sulu-Sulawesi juga menjadi salah satu kawasan yang berperan penting dalam pengelolaan Segitiga Terumbu Karang Dunia.

Namun Laut Sulu-Sulawesi merupakan salah satu wilayah perairan yang rawan terhadap berbagai kejahatan. Beberapa bentuk gangguan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi yaitu kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional seperti perompakan bersenjata dan penculikan dengan meminta tebusan serta migrasi ilegal yang dapat menimbulkan masalah keamanan terutama bagi Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai negara yang beririsan langsung dengan Laut Sulu-Sulawesi. Kerawanan di Laut Sulu-Sulawesi kembali menempatkan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan paling berbahaya di dunia. Pada 21 September 2016, ReCAAP ISC menyarankan agar seluruh kapak menghindari jalur Laut Sulu-Sulawesi karena kondisi tingkat kerawanannya yang tinggi (Roza, 2018).

Serangan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi ini melibatkan penculikan dan penyanderaan dengan meminta uang tebusan. Ancaman serangan bajak laut di Laut Sulu-Sulawesi menjadi sebuah persoalan yang serius. Ancaman perompakan jika tidak segera dikelola akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dan negara, mengancam nyawa pelaut, dan melumpuhkan aliran perdagangan global. Berikut data insiden perompakan bersenjata dan penculikan terhadap awak kapal di kawasan Laut Sulu-Sulawesi sejak tahun 2016-2020



Sumber: Situation Update January-July 2021 ReCAAP ISC

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat dilihat bahwa insiden perompakan dan penculikan awak kapal di Laut Sulu Sulawesi cenderung mengalami penurunan. ReCAAP ISC (2021) menyatakan bahwa dalam insiden-insiden perompakan di Laut Sulu-Sulawesi terdapat 86 orang awak kapal yang diculik, 75 orang awak kapal berhasil diselamatkan, dan 11 orang meninggal. Meskipun jumlah insiden di Laut Sulu-Sulawesi mengalami penurunan, kawasan ini masih menyimpan ancaman bagi keamanan pelayaran dan pelaut. Menurut Roza (2018), “Ketika di seluruh dunia serangan bajak laut mengalami penurunan signifikan sebagai hasil dari berbagai kerja sama antarnegara, Laut Sulu-Sulawesi justru tumbuh sebagai perairan yang paling berbahaya akibat banyaknya korban penculikan dan bahkan kematian” (p. 3). *International Maritime Bureau Piracy Reporting Center* juga menghimbau negara agar tidak cepat berpuas diri dengan angka kejahatan perompakan yang ada saat ini.

Aksi perompakan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan *Abu Sayyaf Group* (ASG). ASG merupakan

sebuah kelompok ekstrimis Islam yang berbasis di Filipina Selatan dan sebagian besar perompakan di Laut Sulu Sulawesi ini dilakukan oleh ASG (ReCAAP ISC, 2019). Secara geografis, *Abu Sayyaf Group* ini sangat dekat dengan wilayah perbatasan yang dapat menimbulkan berbagai aksi terror yang menjangkau lintas negara. ASG mengguakan perahu jenis jungkong dan mengincar *freeboard* rendah dan juga kapal berkecepatan lambat. Sejak tahun awal tahun 2000-an, ASG telah melakukan beberapa penculikan terhadap wisatawan di *resort* Malaysia dan Filipina, serta melakukan penenggelaman kapal ferry di Manila Bay pada bulan Februari 2004 yang menyebabkan 116 orang meninggal dunia (Roza, 2018). Aksi perompakan ini merupakan salah satu cara kelompok ini dalam mendanai kegiatannya. ASG memiliki jaringan yang kuat dengan basis di Indonesia dan Malaysia. Anggota kelompok ASG ini juga berjanji setia kepada Abu Bakar Baghdadi (ISIS). Aksi ASG di kawasan Laut Sulu-Sulawesi dikhawatirkan akan memperbesar dan memperkuat kelompok ini sehingga menjadi ancaman besar bagi kawasan. Hal ini menunjukkan dimensi ancaman semakin berkembang dengan dilakukan oleh aktor non-negara.

Berdasarkan Resolusi *International Maritime Organization* (IMO) dalam Roza (2018), "Serangan yang terjadi di laut teritorial menjadi kewenangan penuh negara terkait dan penegakan hukum dilakukan sepenuhnya berdasarkan hukum nasional negara tersebut" (p. 10). Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan kawasan Laut Sulu-Sulawesi, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga keamanan kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Pada Mei 2016, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan mengeluarkan pernyataan bersama soal keamanan di Laut Sulu dalam kesepakatan yang disebut *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) (BBC News, 2017) (Diakses 21 Juli 2021). TCA sendiri menurut (Primayanti, Legionosuko, & Waluyo, 2020) sebagai berikut:

TCA di Laut Sulu terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (*Coordinated Sea Patrol*), Patroli Udara (*Air Patrol*), Pertukaran Informasi dan Intelijen (*Information and Intelligent Sharing*) dan Latihan Darat Bersama (*Land Exercise*). Keempat patroli tersebut merupakan kerja sama strategis yang merupakan suatu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan perbagian atau fungsinya (Primayanti, Legionosuko, & Waluyo, 2020, p. 1).

TCA ini pada awalnya dimotivasi oleh keinginan bersama dari ketiga negara untuk membahas dan mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi ancaman asimetris, terutama perampokan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok radikal Abu Sayyaf. Dalam hal ini, ketiga negara sepakat bahwa ancaman perompakan di laut, penyanderaan, dan kejahatan transnasional dapat menurunkan kepercayaan perdagangan, perniagaan, dan kepercayaan terhadap kawasan secara umum.

Pada Juni 2017, ketiga negara secara resmi meluncurkan *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*, yang kemudian pada Oktober 2017 dilengkapi dengan kesepakatan untuk melakukan *Trilateral Air Patrol* di laut Sulu-Sulawesi. Sampai dengan insiden pada September 2018, kerja sama Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina ini bisa dianggap berhasil menekan jumlah serangan bajak laut di Laut Sulu-Sulawesi. Namun pada tahun 2019, insiden perompakan dan penculikan terhadap awak kapal di Laut Sulu-Sulawesi kembali terjadi. Insiden di Laut Sulu-Sulawesi ini menjadi sebuah peringatan keras bagi ketiga negara bahwa perairan Laut Sulu-Sulawesi masih menyimpan potensi ancaman bagi keamanan pelayaran. Masih adanya insiden di Laut Sulu-Sulawesi ini terjadi karena masih terdapat persoalan dalam pelaksanaan TCA seperti tidak terbukanya ketiga negara serta persoalan kapabilitas militer yang dimiliki oleh ketiga negara.

Menurut Murphy (2008), *piracy is a land-based crime*. Perompakan memiliki tujuannya sendiri dari kapal-kapal yang dirampok. Hal ini menjelaskan bahwa perompakan yang terjadi di laut tidak dapat dilepaskan dari aspek darat. Hal ini mengarah kepada bagaimana

mengembangkan, meningkatkan, dan menerapkan peraturan baru jika aktor-aktor seperti pemerintah, kapal dan pelaut, militer, swasta serta lembaga lainnya terlibat dalam penciptaan ketidakpastian di laut (Kyrychenko, 2018). Hal ini menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di laut tidak dapat dilepaskan dari aspek darat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyatakan bahwa kerja sama aspek darat berupa latihan darat bersama ini merupakan komponen ketiga dari TCA (Ryacudu, 2020). Kerja sama Indomalphi aspek darat merupakan upaya lanjutan menjaga keamanan wilayah perairan dalam bentuk latihan darat serta melakukan operasi bersama di wilayah daratan. Kerja sama aspek darat ini baru ditandatangani pada tahun 2019 dalam Shang Ri-La Dialogue yang dilaksanakan di Singapura (BBC News, 2019) (Diakses 27 Januari 2021). Kerja sama wilayah darat merupakan kerja sama yang dibutuhkan untuk mencapai hasil maksimal dalam Trilateral Cooperative Agreement Indomalphi. Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis di kawasan, maka Menteri Pertahanan ketiga negara sepakat untuk memperluas aspek kerja sama dalam bentuk Indomalphi Middle Land Exercise. Pemerintah Indonesia mendorong terbentuknya patroli udara dan latihan darat bersama negara-negara anggota. Hal ini merupakan pengembangan dari patroli laut dan intelijen dalam kerja sama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) serta meningkatkan sarana dan prasarana di daerah perbatasan (Primayanti, Legionosuko, & Waluyo, 2020, p. 9). Kerja sama aspek darat ini direalisasikan dalam bentuk latihan bersama pasukan Angkatan Darat di Tarakan, Kalimantan Utara pada tahun 2019. Kerja sama aspek darat ini merupakan kerja sama yang dipandang dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar negara yang terlibat dan juga dalam rangka peningkatan kapabilitas militer. Menurut pengamat isu pertahanan, Mufti Makarim, perjanjian militer Indonesia Malaysia, dan Filipina ini lebih ditujukan sebagai penguat relasi psikologis antara ketiga negara.

Indonesia kurang yakin dengan operasi militer Filipina karena Abu Sayyaf terus eksis. Sementara itu Filipina menganggap Malaysia tidak proaktif karena militan Filipina punya jaringan dengan kelompok di utara Malaysia (BBC News, 2019) (Diakses 27 Januari 2021). Persoalan ini juga berkaitan dengan persoalan di mana ketiga negara ini tidak membukakan kedaulatannya dalam menghadapi ancaman di Laut Sulu-Sulawesi. Hal ini menunjukkan dalam kerja sama yang dilakukan oleh ketiga negara ini masih terdapat *trust issue*.

Kerja sama trilateral aspek darat ini merupakan bagian dari TCA namun tidak ditandatangani sejak dahulu. Terdapat persoalan kebijakan dalam kerja sama aspek darat ini. Juru bicara Armed Force of the Philippines (AFP), Kolonel Restituto Padilla mengatakan bahwa konstitusi Filipina tidak mengizinkan keterlibatan pasukan militer negara lain untuk ikut beroperasi tanpa adanya perjanjian. Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah menyusun perjanjian melalui TCA pada tahun 2016. Namun Filipina memiliki pandangan bahwa lokasi pembajakan dan penculikan yang dilakukan kelompok separatis Abu Sayyaf adalah di kawasan Laut Sulu yang merupakan wilayah kedaulatan Filipina sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut harus sesuai dengan konstitusi Filipina (Rahmadhani, Fasisaka, & Nugraha, 2019, p. 2). Dalam kerja sama trilateral wilayah darat, Filipina memiliki syarat yaitu memberlakukan kebijakan *Status of Visiting Forces Arrangement* (SOVFA). Filipina lebih siap untuk menyepakati adanya SOVFA karena Filipina memiliki pengalaman menerima pasukan asing dalam jumlah besar. Sebaliknya, pihak Indonesia belum memiliki pengalaman tersebut. Dalam draft SOVFA terdapat pasal yang mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan diadili oleh Host Country serta beberapa pasal lain yang dipandang akan merugikan pihak RI (Rahman, 2019, pp. 5-6). Selain itu, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almashyari juga menyatakan bahwa realisasi kesepakatan ini masih tidak jelas (BBC News, 2019) (Diakses 27

Januari 2021). Kerja sama aspek darat ini ditandatangani pada tahun 2019 dan akan dilihat realisasinya di tahun-tahun berikutnya. Kerja sama aspek darat ini merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dalam rangka mengatasi ancaman di Laut Sulu-Sulawesi. Keputusan Indonesia untuk tetap menandatangani kerja sama aspek darat dengan Malaysia dan Filipina meskipun terdapat kebijakan SOVFA yang dipandang akan merugikan pihak Indonesia. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka menciptakan *confidence building measure* (CBM) serta berkaitan dengan kapabilitas militer ketiga negara.

Berdasarkan penjabaran latar belakang, dalam kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina terdapat beberapa persoalan terkait diplomasi pertahanan yaitu adanya *trust issue* serta kapabilitas militer yang masih kurang memadai antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Fenomena ini merupakan bagian dari pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia dan akan dijelaskan menggunakan konsep diplomasi pertahanan. Penelitian ini akan fokus kepada kerja sama trilateral yang dimulai pada tahun 2016 dan kerja sama aspek darat Indomaphi yang disahkan pada tahun 2019. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina untuk Mengatasi Perompakan di Laut Sulu-Sulawesi (Studi Kasus Kerja Sama Trilateral Aspek Darat Indonesia-Malaysia-Filipina Tahun 2016-2019)”. Peneliti akan melakukan analisis mengenai diplomasi pertahanan Indonesia karena kerja sama ini merupakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengatasi ancaman di Laut Sulu-Sulawesi

1.2. Fokus dan Subfokus

Fokus dalam penelitian ini yaitu menganalisis berbagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk mengatasi

perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Subfokus penelitian ini mencakup kerja sama kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama aspek darat Indonesia Malaysia Filipina untuk mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi. Penelitian ini akan fokus kepada kerja sama aspek darat yang dimulai dari munculnya kerja sama trilateral pada tahun 2016 hingga akhirnya disahkan dan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk memahami pelaksanaan kerja sama aspek darat Indomalphi.

1.3. Rumusan Masalah

Kerja sama trilateral aspek darat yang disahkan pada tahun 2019 merupakan bagian tak terpisahkan dari *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA) Indomalphi yang telah disahkan sejak tahun 2016. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dalam sub-bab latar belakang, penelitian ini akan fokus pada kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina dari tahun 2016-2019 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerja sama Trilateral Indonesia Malaysia Filipina aspek darat dalam mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi?
2. Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama aspek darat Indonesia Malaysia Filipina untuk mengatasi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam mengatasi gangguan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi
2. Menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama trilateral aspek darat Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk menghadapi perompakan di Laut Sulu-Sulawesi

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dalam penanganan ancaman-ancaman non-militer yang terjadi di perairan Indonesia khususnya yang terkait dengan berbagai bentuk kebijakan dan kerja sama pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis bagi penelitian sejenis yang mengambil tema kerja sama trilateral Indonesia Malaysia dan Filipina dalam mengatasi gangguan keamanan di Laut Sulu-Sulawesi

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para *stakeholders* bidang kerja sama pertahanan terutama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam mengembangkan berbagai bentuk kerja sama pertahanan khususnya terkait kerja sama trilateral dalam mengatasi berbagai ancaman dengan lebih optimal di tingkat kawasan.